

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Agensi

Teori Keagenan atau *agency theory* merupakan gambaran hubungan antara pihak yang memiliki wewenang yakni investor yang biasa disebut dengan *principal* dengan para manajer yang merupakan *agent* yang diberikan wewenang (Fatmawati, 2017:3). Jensen dan Meckling (1976) dalam Yunel Fatmawati (2017) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak kerja antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau

insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi tercapai.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998 dalam Suryani, 2010).

Eisenhardt (1989), Ujijanto dan Pramuka (2007) dalam Suryani (2010) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut.

Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

2.1.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Definisi laporan keuangan menurut Baridwan (2004) dalam Suryani (2010) yaitu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang berjalan. Manajemen membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2009) mendefinisikan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang disajikan adalah:

1. Neraca

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu dan ketidak pastian arus kas masa depan.

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Investor dan kreditor menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba/rugi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

3. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode transaksi investasi, transaksi pembiayaan dan kenaikan atau penurunan bersih kas satu periode.

4. Laporan ekuitas pemilik

laporan ekuitas pemilik atau sering disebut laporan perubahan ekuitas pemegang saham melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas pemegang saham dari total ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta laporan tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen.

Laporan keuangan harus disusun dengan baik agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan. Hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik kualitatif dari informasi. Dalam bukunya “Teori Akuntansi” dari Chairi dan Ghozali (2007) dalam Suryani (2010) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi tersebut antara lain:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki manfaat sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, relevan merupakan kemampuan dari suatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pemakai laporan keuangan lainnya sehingga keberadaan informasi tersebut mampu mengubah atau mendukung harapan mereka tentang hasil-hasil atau konsekuensi tindakan yang diambil.

2. Keandalan (*reliability*)

Keandalan merupakan informasi yang menyebabkan pemakai informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Dalam konteks kerangka konseptual agar memiliki keandalan. Informasi harus diuji kebenarannya (*variabel*), netral dan menggambarkan keadaan secara wajar sesuai peristiwa yang digambarkan (*representational faithfulness*).

3. Daya banding dan konsistensi

Suatu informasi dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat saling diperbandingkan baik antar periode maupun antar perusahaan. Disamping itu informasi dikatakan bermanfaat kalau ada konsistensi dalam proses penyajiannya.

4. Pertimbangan biaya dan manfaat (*cost-benefit*)

Pertimbangan biaya dan manfaat dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan.

5. Materialitas

Materialitas merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengakui suatu informasi akuntansi. Pertimbangan utama dari konsep ini adalah apakah penyajian informasi tertentu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan yang diambil.

2.1.3. *Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* menurut FCGI (2001) dalam Suryani (2010) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan. Sedangkan Hardiningsih (2010) dalam Dewi (2014) *Corporate*

governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Cadbury Report (1992) dalam Praseya (2016) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Definisi lain *Cadbury Committee* memandang tata kelola perusahaan sebagai perangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Organization of Economic Cooperation dan Development (OECD, 2004) dalam Prasetya (2016) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris dan menejer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan saran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

2.1.3.1. **Manfaat *Corporate Governance***

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dalam Ningsaptiti (2010) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

2.1.3.2. **Prinsip Corporate Governance**

Prinsip-prinsip dasar peneraan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dalam Ningsaptiti (2010) adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (keadilan)

Menjamin adanya perilaku adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

2. *Transparency* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

3. *Accountability* (akuntabilitas)

Menjelaskan fungsi, stuktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggung jawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

4. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

2.1.3.3. **Pedoman *Good Corporate Governance***

Komite Nasional kebijaksanaan *Corporate Governance* berhasil menetapkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) setelah melakukan pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas. Menurut *Komite Nasional Kebijakan Governance* (KNKG) dalam Fatmawati (2017), yaitu:

1. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik telah diajukan kepada pemerintah sebagai inisiatif dan sektor swasta untuk dipergunakan sebagai acuan dan referensi dalam mengatur berbagai macam sektor-sektor swasta, profesi-profesi penunjang dan bahan pelatihan bagi para manajer.

2. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik akan ditetapkan seperti halnya standar dalam industry (contohnya ISO 9000). Sebagai tambahan para pembuat peraturan akan mengambil bagian-bagian dari pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik bagi penerapan peraturan-peraturan sektoral.
3. Lembaga pemeringkat independen akan melakukan pemerinkatan kepatuhan perusahaan sebagai bagian dari mekanisme pengontrolan oleh publik.

2.1.4. **Mekanisme *Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Lastanti (2004) dalam Ningsaptiti (2010), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*.

Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan direksi, dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Kualitas mekanisme internal secara luas berhubungan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik. Gillan (2006) dalam Lestari & Cahyati (2017) menjelaskan bahwa mekanisme internal yang berada di dalam perusahaan dan berasal dari dua pihak yakni dewan komisaris sebagai titik tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal dan manajemen bertindak sebagai agen perusahaan. Berikut merupakan mekanisme internal pengawasan *corporate governance*:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Dalam bentuk kongretnya RUPS merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan- keterangan mengenai perseroan, baik dari direksi maupun dewan komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan dana dari investor.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Di Indonesia, tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tercantum pada bab VI (enam) mengenai direksi dan komisaris, jumlah anggota dewan direksi minimal satu orang. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai. Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan *principal* dan manajer di dalam perusahaan.

KNKG (2006) dalam Fatmawati (2017) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sementara *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2009) dalam Fatmawati (2017) mendefinisikan dewan komisaris sebagai inti *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan

manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Berikut tugas-tugas utama Dewan Komisaris yang dijabarkan dalam *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI, 2009:10* dalam Suryani, 2010):

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;

4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Sembiring (2003) dalam (Bukhori dan Raharja, 2012) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executif Officer* (CEO) dan semakin dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Sebagai wakil dari *principal* di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen secara umum, sehingga diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan.

Selain itu, sebagai penyelenggara pengendalian internal perusahaan, dewan komisaris dapat meningkatkan standar kinerja manajemen dalam perusahaan.

d. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan perusahaan. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Rachmawati dan Triatmoko, 2007 dalam Suryani, 2010). Suaryana (2005) dalam Suryani (2010) menemukan bahwa pasar menilai laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih baik daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Nasution dan Setiawan (2007) dalam Jao dan Pagalung (2011) menemukan hubungan negatif antara komite audit dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab, terbuka, dalam pelaporan keuangan dan menghindari praktik manajemen laba karena komite audit akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Komite audit memiliki

peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, oleh karena itu keberadaannya pun telah diatur oleh pemerintah dengan mewajibkan perusahaan mempunyai komite audit.

Dalam pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (2002) dalam Suryani (2010) tujuan dibentuknya komite audit antara lain :

1. Pelaporan keuangan

Komite Audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.

2. Manajemen resiko dan kontrol

Komite Audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol.

3. *Corporate governance*

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris,
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan,
3. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif,
4. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan,
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif,
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen,
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan, pengendalian pasar dan pemegang saham. Adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan membuat

pemegang saham ada pada posisi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki kendali terhadap manajemen untuk menuntut mereka melaporkan laporan keuangan secara akurat. Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah dan institusi swasta. Struktur kepemilikan meliputi kepemilikan-kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham Tamba (2011). Jensen dan Meckling (1976) dalam kumala (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan intitusional adalah sebagai dua indikator mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham perusahaan

dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan Fauziyah (20014:34) dalam Kumala (2016:21).

Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jensen dan Meckling (1976) dalam Kumala, (2016:21) menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyertakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang

saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba Fauziyah (2014:34) dalam Kumala (2016:22).

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan. Ujijanto dan Pramuka (2007) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013). Menurut Wening (2009) dalam Mulyati (2011), kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat dan dapat memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat di gunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional. Sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari para manajer perusahaan (Kusumawardhani, 2012). Kepemilikan saham diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan tersebut.

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada total asset perusahaan. Suwito dan Herawaty (2005). Ningsaptiti

(2010:43) dalam Kumala (2016:33) ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar asset maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Ningsaptiti (2010:43) dalam Kumala (2016:33).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan laba secara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat.

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanam (Dewi, 2014). Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham. Kusumawardhani (2012:46) Kumala (2016:24).

2.1.6. *Earning Management* (manajemen laba)

Manajemen laba (*Earning Management*) di definisikan sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu Scott (2003) dalam Ningsaptiti (2010). Manajemen laba (*earning management*) terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan dalam melakukan penyusunannya dalam penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan maupun untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan Noviardhi dan Hadiprajitno (2013) dalam Prasetya (2016).

Menurut Sitorus, (2006) dalam Izza Kumala (2016:27), manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki perusahaan. Menurut Sugiri, (1998) dalam Kumala (2016:27), membagi definisi manajemen menjadi dua yaitu:

a) Definisi Sempit

Earning Management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan periode metode akuntansi. *Earning*

Management dalam arti sempit didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya *earning*.

b) Definisi Luas

Earning Management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) *profitabilitas* ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Konsep *earning management* menurut Salno dan Baridwan, (2000) dalam Mulyati (2011) menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa "praktek *earning management* dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya."

2.1.6.1. **Pola-Pola *Earning Management***

Menurut Scott (1997) dalam Fatmawati (2017) pola manajemen laba, dapat berupa :

❖ *Taking a bath,*

manajer melakukan metode *taking a bath* dengan mengakui biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang pada periode berjalan ketika pada periode berjalan terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan.

❖ *Income minimization,*

manajer melakukan praktik manajemen laba berupa *income minimization* dengan mengakui secara lebih cepat biaya-biaya, seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan, ketika perusahaan memperoleh profit yang cukup besar dengan tujuan untuk mengurangi perhatian politis.

❖ *Income maximization,*

merupakan upaya manajemen untuk memaksimalkan laba yang dilaporkan.

❖ *Income smoothing,*

merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba, dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, sehingga perusahaan tampak lebih stabil dan tidak beresiko.

2.1.6.2. Model dan Metode *Earning Management*

Earning Management (manajemen laba) dapat dilakukan dengan memperlakukan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008), alasannya komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya memperlakukan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.

Oleh sebab itu upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan.

Untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Atau sebaliknya, biaya baru akan diakui pada periode yang akan datang meski pengeluaran kas telah dilakukan pada periode sebelumnya. Selain itu perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya

yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya pada saat barang terjual.

Sebaliknya metode pencatatan ini membuat perusahaan dapat menunda pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode berikutnya, meskipun kas telah diterima. Artinya, perusahaan dapat mengakui pendapatan pada periode tertentu walaupun kas baru akan diterima pada periode yang akan datang. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai *account accrual* dalam laporan keuangan, misalkan piutang dagang, pendapatan diterima dimuka, hutang biaya, biaya depresiasi dan biaya dikeluarkan dimuka, biaya cadangan, biaya depresiasi, dan lain-lain.

Model pencatatan akrual ini berbeda dengan model akuntansi berbasis kas (*cash basis of accounting*) yang hanya mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan biaya pada saat kas dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas ini menghitung dan menentukan laba periode berjalan tergantung pada penerimaan dan penerimaan kas tunai sehingga prinsip perbandingan (*matching cost to revenue*) diabaikan. Akibatnya laporan keuangan yang dibuat dengan basis kas tidak dapat mencerminkan kinerja sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu.

Berdasarkan perbedaan basis akrual yang ada di atas. Menurut Yunel Fatmawati (2017) Dasar akrual merupakan dasar yang dipilih untuk penyusunan laporan keuangan yang mana dasar akrual dipandang lebih rasional dibandingkan dasar kas. Selain itu dasar akrual mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dimana hak dan kewajiban perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan tersebut. Namun dasar akrual juga memberi kelonggaran pada manajemen dalam hal pemilihan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang bersangkutan. Peluang ini sering digunakan oleh manajer ketika mereka menghendaki insentif tertentu bagi dirinya sendiri.

Earning Management biasanya diteliti dengan cara peneliti membentuk hipotesis dimana manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji kemungkinan tersebut dengan model metode akrual yang tepat. Menurut Sulistyanto (2008) secara umum ada tiga model pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba (*Earning Management*) yaitu:

1. Model Berbasis *Aggregate Accrual*

Model berbasis *aggregate accrual* ini adalah model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa tindakan manajemen laba. Dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali

dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986) dan Jones (1991). Selanjutnya Dechow, Sloan dan Sweeney mengembangkan model Jones menjadi model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones models*) dalam Sulistyanto (2008:211). Model-model ini menggunakan total akrual (TAC) dan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan (*expected accruals*) dan akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*).

Model Healy (1985) merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (*total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Padahal total akrual merupakan penjumlahan *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (*discretion*) manajerial, sementara *non discretionary accruals* merupakan komponen yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan.

Model Deangelo (1986) dikembangkan dengan menggunakan perubahan-perubahan dalam total akrual (*change in total accruals*) sebagai proksi manajemen laba. Model Jones (1991) menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan *property, plant, and equipment* sebagai proksi

manajemen laba. Model Jones dimodifikasi (*modified Jones model*), dechow et. al. (1995) dalam Sulistyanto (2008) menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan *property, plant and equipment*, dimana pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang yang terjadi pada periode bersangkutan sebagai proksi manajemen laba.

2. Model Berbasis *Specific Accruals*

Model berbasis *specific accrual* merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*) yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

Model ini dikembangkan oleh McNicholas dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Bever dan McNicholas, McNicholas dan Wilson. mengembangkan model yang menggunakan sisa provisi untuk piutang tak tertagih yang diestimasi sebagai sisa regresi provisi untuk piutang tak tertagih pada saldo awal, serta penghapusan piutang periode berjalan dan periode yang akan

datang sebagai proksi manajemen laba. Model berikutnya dikembangkan oleh Petroni yang menggunakan klaim terhadap estimasi cadangan kesalahan yang diukur selama lima tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan *property* sebagai proksi manajemen laba.

Model Beaver dan Engel menggunakan biaya yang tersisa dari kerugian pinjaman yang diestimasi sebagai sisa regresi biaya dari kerugian pinjaman pada *change-of* bersih, pinjaman beredar aktiva yang tidak bermanfaat dan melebihi satu tahun perubahan aktiva tidak bermanfaat sebagai proksi manajemen laba. sementara Beneish mengembangkan model yang menggunakan hari-hari dalam indeks piutang, indeks laba kotor (*gross margin*), indeks kualitas aktiva indeks depresiasi indeks biaya administrasi umum dan penjualan, indeks total akrual terhadap total aktiva sebagai proksi manajemen laba. Terakhir model Beaver dan McNichols yang menggunakan korelasi serial dari satu tahun perkembangan cadangan kerugian penjaminan kerusakan *property* sebagai proksi manajemen laba.

3. Model Berbasis *Distribution of Earning After Management*

Sementara model berbasis *Distribution of Earning After Management* ini dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Petel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner.

Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada diatas maupun dibawah *benchmark* telah didistribusikan secara merata atau merefleksikan ketidak berlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

Model Burgtähler dan Dichev merupakan model yang menguji apakah frekuensi realisasi laba tahunan yang merupakan bagian atas (bawah) laba besarnya nol dan laba akhir tahun adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Selanjutnya DeGeorge, Petel dan Zeckhauser mengembangkan model yang menguji apakah frekuensi realisasi laba kuartalan yang merupakan bagian atas (bawah) laba besarnya nol, laba akhir kuartal dan *forecast* investor adalah lebih besar (kecil) daripada yang diharapkan untuk mendeteksi manajemen laba. Model Myers dan Skinner merupakan model yang menguji apakah angka-angka laba meningkat yang berurutan adalah lebih besar dibandingkan angka-angka jika tanpa manajemen laba untuk mendeteksi manajemen laba.

➤ Metode Akruai

Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan secara umum diteliti melalui penggunaan akrual. Akruai, secara teknis, merupakan perbedaan antara kas dan laba. Akruai merupakan komponen utama pembentuk laba dan akrual disusun berdasarkan estimasi-estimasi tertentu. Misalnya saja biaya depresiasi, untuk mengetahui besarnya biaya ini kita harus mengetahui biayanya, umur manfaat (*estimation*), dan metode depresiasi yang digunakan. Nilai biaya memang sudah tetap (*fixed*) dan tidak bisa diubah-ubah namun umur manfaat dan metode depresiasi bisa diubah sesuai dengan kebijakan atau pertimbangan atau *discretion managemen*. Secara umum, akrual, yang merupakan produk akuntansi, dapat dianggap memiliki jumlah yang “relatif tetap” dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan aturan akuntansi terkait juga tidak mengalami perubahan. Perubahan akrual yang terjadi, oleh karenanya, dapat dianggap sebagai hal yang tidak normal (*abnormal*). Perubahan ini merupakan hasil penggunaan kebijakan (*discretion*) manajemen yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manajemen juga memiliki insentif/motif untuk memanipulasi laba maka perubahan akrual yang terjadi dianggap sebagai bentuk manipulasi laba yang dilakukan

manajemen. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Menurut Zia We Tyas (2012) Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

(i) *Non discretionary accruals*

Bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *normal accruals* atau *nondiscretionary accruals*. *Nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang terjadi seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan. Banyak dari model estimasi akrual nondiskresioner perusahaan dari level akrual masa lalu perusahaan sebelum periode ketika tidak terdapat manajemen laba yang sistematis (Jones, 1991 dalam Tyas, 2012).

(ii) *Discretionary accruals*

Bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan *abnormal accruals* atau *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang berasal dari *earnings management* yang dilakukan manajer. Akrual diskresioner tidak bisa diobservasi langsung dari laporan keuangan, maka harus diestimasi melalui beberapa model. Model tersebut membentuk ekspektasi pada level

akrual non diskresioner dan jumlah deviasi yang diobservasi secara aktual, hal ini diasumsikan sebagai akrual nondiskresioner. Sehingga akrual diskresioner didefinisikan sebagai akrual melalui model yang digunakan. Apakah ini proksi yang bagus dan tepat atau tidak untuk manajemen laba atau tidak akan bergantung pada kemampuan model untuk dengan benar memprediksi bagaimana perubahan dan kondisi bisnis mempengaruhi akrual. Menurut Sulistyanto (2008:211) model pemisahan akrual menjadi kelolaan dan non kelolaan yang dibandingkan oleh Dechow, dkk adalah sebagai berikut:

❖ *Model Healy*

Healy Model (1985) dalam Sulistyanto (2008) secara umum model ini tidak berbeda dari model-model lain yang dipergunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ Operation$$

Untuk menghitung *non discretionary accruals* model Healy (1985) membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh sebab itu total akrual selama periode estimasi merupakan representasi ukuran *non discretionary accruals* dan dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\Sigma TAC}{TA}$$

Notasi:

NDA = *Non Discretionary Accruals*

TAC = Total akrual yang di skala dengan total aktiva

TA = Total Aset tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Untuk menghitung *discretionary accruals* model Healy (1985) membagi total akrual (TAC) dengan total *non discretionary accruals* (NDA). Dimana *discretionary accrual* merupakan ukuran dari manajemen laba dirumuskan sebagai berikut:

$$DA_t = \frac{TAC_t}{NDA_t}$$

Notasi:

DA_t = *Discretionary Accruals* periode t

TAC_t = Total akrual yang di skala dengan total
aktiva

periode t

NDA_t = *Non Discretionary Accruals* periode t

t = 1,2,3...t merupakan tahun *subscript* untuk
tahun yang dimasukkan dalam periode
estimasi.

❖ *Model De Angelo*

De Angelo (1986) dalam Sulistyanto (2008) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan pertama dalam total akrual dan dengan mengasumsikan bahwa perbedaan pertama memiliki nilai nol yang diharapkan berdasarkan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode lalu (diskala dengan total asset t-1) sebagai ukuran akrual non diskritoner yaitu:

DeAngelo (1986)

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:

NDA_t = Estimasi *non discretionary accrual*;

TAC_{t-1} = Total akrual dibagi total aktiva 1 tahun
sebelum tahun t.

Dechow et al. (1995) dalam Suyono (2017) menjelaskan bahwa model DeAngelo dapat dipandang sebagai kasus khusus dari model Healy (1985), dimana periode estimasi akrual non diskritoner dibatasi pada pengamatan tahun sebelumnya. Gambaran umum model Healy dan DeAngelo adalah bahwa keduanya menggunakan total akrual dari periode estimasi ke proxy untuk akrual nondiskritoner yang diharapkan. Jika akrual nondiskritoner konstan dari waktu ke waktu dan akrual diskretioner memiliki rata-rata nol pada periode estimasi, maka model Healy dan DeAngelo akan mengukur akrual nondiskritoner tanpa kesalahan. Namun jika akrual nondiskritoner berubah dari satu periode ke periode lainnya, maka kedua model akan cenderung mengukur akrual nondiskritoner dengan kesalahan. Selanjutnya Dechow et al. (1995) dalam Suyono (2017)

menjelaskan bahwa ketika akrual nondiskritoner mengikuti proses yang konstan, maka model Healy lebih sesuai digunakan. Sebaliknya, jika akrual nondiskritoner mengikuti proses yang acak, maka model De Angelo lebih sesuai.

❖ *Model Jones*

Jones (1991) dalam Sulistyanto (2008) mengusulkan sebuah model yang menyederhanakan anggapan bahwa akrual non diskritoner bersifat konstan. Modelnya mencoba mengendalikan efek perubahan pada lingkungan ekonomi perusahaan terhadap akrual nondiskritoner. Model Jones untuk akrual nondiskritoner pada tahun yang bersangkutan yaitu: Jones (1991) dalam Sulistyanto (2008)

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 (PPE_t)$$

Keterangan:

ΔREV_t = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 dibagi dengan total asset pada t-1;

t

PPE_t = Properti, pabrik dan peralatan pada tahun

dibagi dengan total asset pada t-1;

A_{t-1} = Total aset pada tahun t-1

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = parameter-parameter spesifik perusahaan.

Estimasi parameter spesifik perusahaan ($\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$) dihasilkan dengan menggunakan model berikut pada periode estimasi Jones (1991) dalam Sulistyanto (2008).

$$TA_t = a_1 (1/A_{t-1}) + a_2 (\Delta REV_t) + a_3 (PPE_t) +$$

ut

dimana:

TA_t = Total AkruaI dibagi dengan total asset tahun

t-1

$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ = menunjukan estimasi koefisien regresi dari

$\alpha_1 \alpha_2$ dan α_3

Dechow et al. (1995) dalam Suyono (2017) menjelaskan bahwa hasil perhitungan model Jones menunjukkan bahwa model tersebut berhasil menjelaskan sekitar seperempat variasi total akrual. Asumsi yang tersirat dalam model Jones (1991) dalam Suyono (2017) adalah bahwa pendapatan bukan diskresioner. Jika pendapatan dikelola melalui pendapatan *discretionary*, maka model Jones akan menghapus sebagian dari pendapatan yang dikelola dari proxy akrual diskresioner. Misalnya, pertimbangkan situasi dimana manajemen menggunakan kebijaksanaannya untuk memperoleh pendapatannya pada akhir tahun saat uang belum diterima dan sangat dipertanyakan apakah pendapatan tersebut telah diperoleh. Hasil dari pertimbangan manajerial ini akan meningkatkan pendapatan dan jumlah akrual (melalui peningkatan piutang). Model Jones (1991) dalam Suyono (2017) menterjemahkan total akrual yang berhubungan dengan pendapatan dan oleh karena itu akan mengekstrak komponen diskresioner ini, yang menyebabkan estimasi manajemen laba menjadi bias terhadap nol. Jones mengakui keterbatasan

model ini di dalam tulisannya Dechow et al. (1995) dalam Suyono (2017).

❖ *Model Modified Jones*

Dechow et al. (1995) dalam Sulistyanto (2008) mempertimbangkan versi modifikasi Model Jones dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan Model Jones untuk mengukur akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi, akrual nondiskretioner diperkirakan selama periode peristiwa (yaitu, selama periode di mana manajemen laba dihipotesakan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Model Jones asli adalah bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Model Jones asli secara implisit mengasumsikan bahwa diskresi tidak dilakukan terhadap pendapatan baik dalam periode estimasi atau periode peristiwa. Versi Modifikasi Model Jones secara implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada periode kejadian berasal dari

manajemen laba, hal ini didasarkan pada penalaran bahwa lebih mudah mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan kredit daripada mengelola pendapatan dengan menerapkan diskresi atas pengakuan pendapatan atas penjualan tunai Dechow et al. (1995) dalam Suyanto (2017). Jika modifikasi ini berhasil, maka perkiraan manajemen laba seharusnya tidak lagi bias terhadap nol dalam sampel dimana manajemen laba telah dilakukan melalui pengelolaan pendapatan. Formula selengkapnya dari Model Jones yang Dimodifikasi adalah sebagai berikut (Dechow et al., 1995 dalam Suyanto, 2017):

(1) menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus sebagai berikut:

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, *total accrual (TA)* diestimasi dengan Ordinary Least Square sebagai berikut:

$$TA_{it} = \beta_1(1A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it-1}) + \beta_3(PP_{it-1}) + E_{it}$$

$$A_{it-1}) + \varepsilon$$

Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka *nondiscretionary accruals* (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1(1A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}) + \beta_3(PPE_{it} - PPE_{it-1}) + \varepsilon$$

Terakhir, *discretionary accruals* (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut :

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t ,

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i
dalam

periode tahun t ,

TA_{it} = Total acrual perusahaan i dalam periode
tahun t ,

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode
tahun t ,

CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i
dalam periode tahun t ,

A_{it-1} = total assets perusahaan i dalam periode
tahun $t-1$,

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t
dikurangi dengan pendapatan perusahaan
 I pada tahun $t-1$,

PPE_{it} = property, pabrik, dan peralatan perusahaan i
dalam periode tahun t ,

ΔRec_{it} = piutang usaha perusahaan I pada tahun t
dikurangi pendapatan perusahaan I pada
tahun $t-1$.

ε = *error*

❖ *Model Industry*

Dechow dan Sloan (1991) dalam Suyanto (2017):
menyusun model pengukuran manajemen laba yang

dikenal dengan Model Industry. Serupa dengan Model Jones, Model Industri menyederhanakan anggapan bahwa akrual non diskretioner konstan sepanjang waktu. Namun, alih-alih mencoba secara langsung memodelkan faktor penentu akrual nondiskritioner, Model Industri mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor penentu akrual nondiskresioner adalah umum di seluruh perusahaan di industri yang sama. Model Industri untuk akrual nondiskritioner adalah Dechow dan Sloan (1991) dalam Suyanto (2017):

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{ median I (TA}_t)$$

Dimana:

- median I (TA_t) = nilai median dari total akrual yang diukur dengan aset tahun t-1 untuk semua perusahaan non-sampel dalam kode industry yang sama.
- Parameter spesifik perusahaan γ_1 dan γ_2 diperkirakan menggunakan koefisien regresi pada pengamatan di Periode estimasi.

Kemampuan Model Industri untuk mengurangi kesalahan pengukuran dalam akrual diskresioner

bergantung pada dua faktor. Pertama, Model Industri hanya menghilangkan variasi akrual non discretionary yang umum terjadi di perusahaan-perusahaan di industri yang sama. Jika perubahan akrual nondiskretioner mencerminkan respons terhadap perubahan dalam keadaan spesifik perusahaan, maka Model Industri tidak akan mengekstrak semua akrual *nondiscretionary* dari proxy akrual diskresioner.

Kedua, Model Industri menghilangkan variasi dalam akrual diskresioner yang berkorelasi di seluruh perusahaan di industri yang sama, yang berpotensi menimbulkan masalah. Tingkat keparahan masalah ini bergantung pada sejauh mana stimulus manajemen laba berkorelasi di antara perusahaan-perusahaan di industri yang sama (Dechow et al., 1995 dalam Suyono, 2017).

❖ *Model Stubben*

Conditional revenue model diperkenalkan oleh Stubben (2010) dalam Suyono (2017) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan sebelumnya. Pertama, keterbatasan model

akrual adalah bahwa estimasi *cross-sectional* secara tidak langsung mengasumsikan bahwa perusahaan dalam industri yang sama menghasilkan proses akrual yang sama. Kedua, model akrual juga tidak menyediakan informasi untuk komponen mengelola laba perusahaan dimana model akrual tidak membedakan peningkatan diskresionari pada laba melalui pendapatan atau komponen beban (Stubben, 2010).

Berikut merupakan formula dari *conditional revenue model*:

$$AR_{it} = \alpha + \beta_1 R_{it} + \beta_2 R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 R_{it} \times AGE_SQ_{it} + \beta_5 R_{it} \times GRR_P_{it} + \beta_6 R_{it} \times GRR_N_{it} + \beta_7 R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 R_{it} \times GRM_SQ_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

AR_{it} = Piutang Akrual perusahaan i pada periode t,

R = *annual revenue*,

$SIZE$ = *natural log* dari total asset saat akhir tahun,

AGE = *natural log* umur perusahaan,

GRR_P = *industry median adjusted revenue growth*
(= 0, jika negatif),

GRR_N = *industry median adjusted revenue growth*
(= 0, jika positif),

GRM = *industry median adjusted gross margin at*
end of fiscal year,

_SQ = *square of variable,*

ε = *annual change,*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots$ = koefisien regresi.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Riske Meitha Angraeni dan P. Basuki Hadiprajitno (2013) meneliti tentang “*Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*”. Tujuan peneliti yaitu mengukur

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, komposisi komisaris independen, komite audit dan ukuran KAP, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *corporate governance* (komposisi komisaris independen, komite audit dan ukuran KAP) memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Yuliana Eka Safitri Dewi (2014) meneliti tentang “*Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba*”. Tujuan peneliti yaitu menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Fatchan Achyani, dkk (2015) meneliti tentang “*Pengaruh Praktik Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Intervening (studi kasus pada perusahaan public Indonesia)*”. Tujuan peneliti yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate governance* pada nilai perusahaan di mediasi oleh manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah peran komite audit (independensi komite audit, kompetensi anggota audit, aktifitas komite audit), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi komite audit dan aktivitas komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kompetensi anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Ismalia Asward dan Lina (2015) meneliti tentang “*Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba dengan Pendekatan Conditional Revenue Model*”. Tujuan peneliti yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, ukuran komite audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

sedangkan mekanisme *corporate governance* yang lain tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Izza Kumala (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Earning Management*”. Tujuan peneliti yaitu menguji pengaruh *corporate governance* (proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *Leverage*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh untuk mengurangi tindakan manajemen laba.

Fernandinandus A. Himawan dan Muhamad Ricky (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*”, Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris idependen. Variabel dependennya yaitu manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajemen

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Eva Rosa Dwi dan Moh. Khoirudin (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba pada Perusahaan yang masuk dalam JII tahun 2012-2013*”. Tujuan peneliti yaitu untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel dependen yaitu manajemen laba. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Rizka Fazrina Fitria Prasetya (2016) meneliti tentang “*Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba*”. Tujuan peneliti ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Variabel independen yang digunakan yaitu dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependennya yaitu manajemen laba. Hasil peneliti menunjukkan bahwa dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ani Kurnia Ningsih Lestari dan Ari Dewi Cahyati (2017) meneliti tentang “*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kualitas Akuntansi*”. Tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui efektifitas penerapan mekanisme GCG terhadap kualitas laba. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran kompetensi audit, dan komisaris independen, sedangkan variabel dependen yaitu kualitas laba akuntansi. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan variabel ukuran kompetensi audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Secara umum ukuran komite audit, independensi komite audit dan kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kualitas laba.

Yunel Fatmawati (2017) meneliti tentang “*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap manajemen laba*”. Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui pengaruh mekanisme *coporate governance* terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan adalah dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba.

Hasil penelitian ini adalah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba dan komite audit tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Earning Management*

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena manajer juga mempunyai kepentingan didalamnya. Faisal (2004) menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengidentifikasi adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Hasil penelitian Rizka Fazrina Fitria Prasetya (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Ani Kurnia Ningsih Lestari dan Ari Dewi Cahyati (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas dan manajemen laba. Berdasarkan uraian dan

hasil penelitian diatas, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Earning Management*.

2.3.2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Earning Management*

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Vafeas (2000) dalam Fatmawati (2017) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* sehingga manajemen laba juga diharapkan akan menjadi semakin menurun. Terkait dengan manajemen laba, dewan komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk memonitoring direksi perusahaan tanpa ada

tekanan dari pihak manapun sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun. Hasil penelitian Eva Rosa Dwi dan Moh. Khoirudin (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian Yunel Fatmawati (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *Earning Management*.

2.3.3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Earning Management*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Peranan komite audit sangat diperlukan dalam hal pengawasan perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Carcello *et. al.* (2006) dalam Fatmawati (2017) menyelidiki hubungan antara keahlian komite audit di bidang

keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan komite audit di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen laba. Adanya komite audit di perusahaan diharapkan agar pengawasan terhadap perusahaan dapat meningkat sehingga tercipta praktik perusahaan yang transparan guna meminimalisir manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Earning Management*.

2.3.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Earning Management*

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik manajemen laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan lebih transparan. Oleh karena itu, perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan. Chtourou (2001) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif

terhadap manajemen laba pada perusahaan di Amerika. Ini berarti, perusahaan yang besar mempunyai peluang yang lebih sedikit dalam melakukan praktik manajemen laba dan sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil mempunyai peluang yang lebih besar dalam melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian Veronica dan Utama (2005) menemukan bukti adanya pengaruh negatif signifikan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Nuryaman (2008) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Indra Dewi Suryani (2014) menemukan ukuran perusahaan yang besar dapat mengurangi praktik manajemen laba perusahaan. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ke empat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Earning Management*.

2.3.5. Pengaruh *Good Corporate Governance* (dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit) dan Ukuran Perusahaan terhadap *Earning Management*.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peran penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Disisi lain manajer juga mempunyai kepemilikan pada perusahaan maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena manajer juga mempunyai kepentingan didalamnya. Dalam pengertian ini manajer merupakan salah satu faktor di dalam kepemilikan manajerial yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik manajemen laba.

Maka dari itu perusahaan membentuk suatu komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Peranan komite audit sangat diperlukan dalam hal pengawasan perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Disisi lain Ukuran perusahaan juga dapat menentukan banyak sedikitnya praktik manajemen laba. Perusahaan dengan ukuran

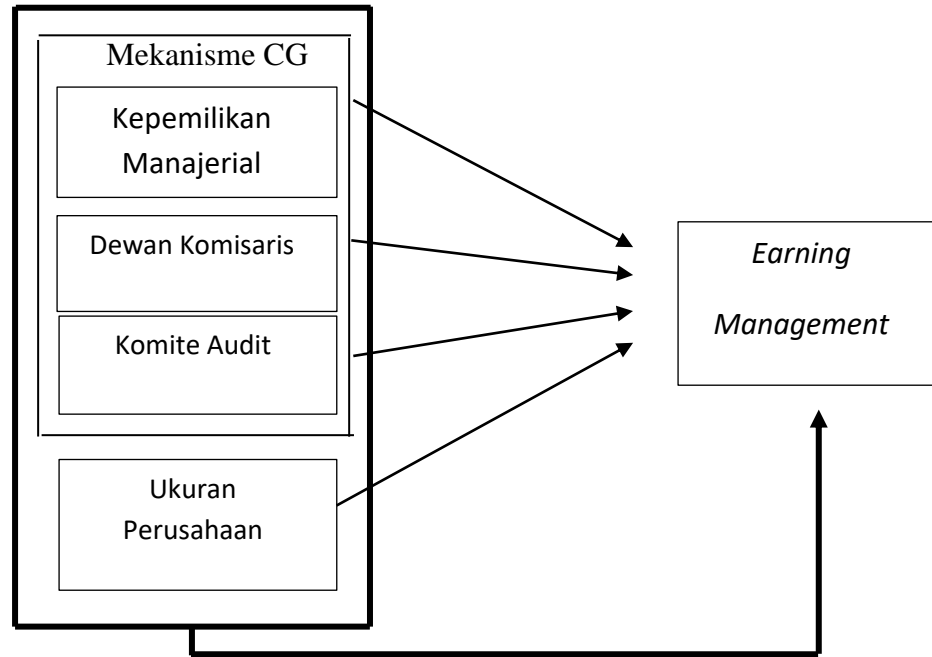
yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan lebih transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ke lima dirumuskan sebagai berikut :

H5 : *Corporate Governance* (kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris dan komite audit) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Earning Management*.

Berdasarkan konsep yang sudah di kemukakan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan :

→ = Secara Simultan

→ = Secara Parsial